

KEPEMIMPINAN WALIKOTA PEREMPUAN DI KOTA TANGERANG SELATAN PADA PERIODE 2011–2019

Saskia Nursukma Andriliani¹
Asep Jatnika²
Budi Sutrisno³

¹Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjajaran

²Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjajaran

³Departemen Sosiologi, Universitas Padjajaran

¹Correspondence Email: Saskia17002@mail.unpad.ac.id

Submitted: 4 Maret 2021, Reviewed: 18 Maret 2021, Accepted: 30 Maret 2021

ABSTRACT

This research purpose to determine how the leadership implementation of female mayors in South Tangerang took place during two periods of leadership in which the leadership was generally dominated by men with long post-reform women's struggle. Woman Leadership begins to appear in public. this research is about Leadership in the sphere of government can be used as an academic insight related to women's leadership. According to Wahjosumidjo Point of view by personality, the position (position), ability, capability, and activity of the leader itself." Wahjosumidjo (1987: 11). Using qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by interview, literature study, and supporting documents. The analysis uses data reduction, data presentation, and summary analysis, and SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, and Threats). In addition, the technique used to verify data is source triangulation. The results of the study describe the leadership of female mayors in South Tangerang based on their personalities with good social capital so that they can attract public sympathy and things that are quite hindering are the leadership background and internal leadership support where humans are. resources are not optimal in following his direction, his leadership shows that there are changes in the first and second periods, the results of this study conclude the analysis and suggestions for his leadership.

Keywords: Leadership, Government and public

ABSTRAK

Pada penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi dari kepemimpinan Walikota perempuan di Tangerang Selatan yang berlangsung selama dua periode kepemimpinan dimana kepemimpinan yang pada umumnya didominasi oleh laki-laki, dengan kiprah perjuangan yang panjang pasca reformasi kepemimpinan perempuan mulai muncul dalam muka publik dan dampaknya dari kepemimpinan perempuan dalam ruang lingkup pemerintahan mampu dijadikan sebagai sarana wawasan akademik terkait dengan kepemimpinan perempuan, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepemimpinan menurut Wahjosumidjo yang ditinjau berdasarkan "kepribadian (personality), kemampuan (ability) dan kesanggupan (capability). Kepemimpinan juga sebagai rangkaian

kegiatan (activity) pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan (posisi) serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri.” Wahjosumidjo (1987:11). Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dan dokumen penunjang. Dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan dan analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threats*). Selain itu teknik yang digunakan untuk memverifikasi data adalah triangulasi sumber. Hasil dari penelitian mendeskripsikan kepemimpinan Walikota perempuan di Tangerang Selatan berdasarkan kepribadian memiliki modal sosial yang baik sehingga mampu menarik simpati masyarakat dan hal yang cukup menghambat adalah latar belakang kepemimpinannya dan pendukung internal kepemimpinannya dimana sumber daya manusianya belum optimal dalam mengikuti arahnya, kepemimpinannya menunjukkan adanya perubahan pada periode pertama dan periode kedua, lainnya hasil dari penelitian ini menyimpulkan analisa dan saran pada kepemimpinannya.

Keywords: Kepemimpinan, Pemerintahan, Publik

PENDAHULUAN

Memberikan peluang yang sama antar kaum laki-laki maupun perempuan. Keberadaan laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keniscayaan, dengan adanya alat tubuh dan berbagai sifat yang melekat pada keduanya menyebabkan secara alamiah akan terbentuk kewajiban kodrati yang harus dilakukan laki-laki dan perempuan.

Keadaan sosial dimasyarakat permasalahan gender masih menjadi isu yang kompleks untuk dibahas karena berdampak pada ketidakadilan sosial, dalam berbagai peranan individu di masyarakat terkait dengan konstruksi sosial dalam memandang gender di tengah masyarakat sehingga munculnya stereotip gender.

Pada tahun 1980, persentase angkatan tenaga kerja wanita yang bekerja hanya sebesar 35,2%. Tahun 1990 persentase tersebut meningkat menjadi 38,6% dan terus meningkat pada tahun 2000 sebesar 45,2% sampai

pada tahun 2010 menjadi sebesar 64,67% (BPS Sakernas, 2010).

Mulai bangkit dari tidur panjang sejak isu hak asasi manusia dan persamaan gender secara lantang disuarakan oleh aktivis feminisme Panitia Inti Kongres Perempuan Indonesia I pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Nyi Hadjar Dewantoro (Wanita Taman Siswa), Ny. Soekonto (Wanita Oetomo - Ketua Kongres), dan Nn. Soejatin (Poetri Indonesia). Dari perjalanan sejarah representasi perempuan didalam parlemen Indonesia mulai muncul, pada tahun 1928 Kongres Wanita Indonesia pertama yang membangkitkan kesadaran dan rasa nasionalisme pada kalangan perempuan menjadi tonggak sejarah perempuan berpeluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan termasuk politik yakni pada pemilihan umum.

Di pemilihan umum pertama 1955, terdapat 6.5% adalah perempuan kemudian persentase perempuan di parlemen Indonesia mengalami pasang

surut sehingga dan mencapai angka tertinggi 13% pada 1987 keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia hanya berkisar 10 % saja sejak digelar pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan data tahun 2004¹.

Sejak reformasi perjuangan pada partisipasi perempuan didalam politik terus diupayakan dimana pengambilan keputusan yang menjadi agenda penting pemerintah dan dalam demokrasi yang inklusif, birokrasi pemerintahan di Indonesia bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan, dari kebijakan- kebijakan publik berdampak pada segala aspek bermasyarakat.

Dalam prakteknya pengakuan konstitusional tersebut hanya sebatas normatif dalam catatan ketenagakerjaan keterlibatan perempuan belum dalam jumlah yang memuaskan sebagai contohnya, pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 65 (1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangkurangnya 30% dan Hasilnya pada pemilu 2009 keterwakilan perempuan hanya 9% dan 91% laki-laki karna keterwakilan perempuan yang masih belum memuaskan memungkinkannya terjadinya *Silent Majority* dalam pengambilan keputusan yang didominasi. Kedudukan sebagai subjek pembangunan, laki-laki dan perempuan mempunyai peranan dan

hak yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan menikmati hasil pembangunan.

Selain itu dalam konteks kultural perempuan yang semata - mata diposisikan pada peran domestik dan reproduksi sehingga hanya untuk berkembang sulit mendapatkan dukungan hal tersebut sangat menghambat kemajuan mereka menggeluti dunia profesi baik dalam ranah publik dan spesialisasi. Sekitar 34 juta jiwa perempuan bekerja di sektor domestik. Sementara hanya 1,7 juta laki-laki bekerja di sektor ini. Ketimpangan jumlah ini seyogianya memperkuat pandangan kultural bahwa perempuan cenderung lebih tepat bekerja di ranah domestik dan dianggap biasa saja oleh masyarakat, walaupun saat ini perempuan bekerja bukan hal asing lagi. Selain itu, BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 6,4%, sedangkan TPT laki-laki 6,02%. Ini menunjukkan bahwa secara konsep ekonomi, perempuan yang bekerja di ranah domestik tidak diperhitungkan usahanya karena tidak dapat menghasilkan ataupun membantu untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Hal tersebut menjadi ancaman hambatan perkembangan Negara Indonesia karena jumlah populasi dari perempuan sangat besar sehingga produktivitas yang didapatkan tidak bisa diperoleh secara maksimal apabila hambatan terhadap kesempatan dan kesetaraan pada perempuan masih terus terjadi.

¹ Data ini diambil dari tulisan Khofifah Indar Parawansa, *Obstacles to Women's Participation in Indonesia* yang dimuat di IDEA International 2002 terjemahan Bahasa

Inggris .dari judul Bahasa Indonesia Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. www.idea.int diakses pada 20 Agustus Pkl:13.05

Dilansir dari laman *KataData*,² jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan mencapai angka 266,91 juta jiwa. Data tersebut terdiri atas jumlah 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. Bahkan pada tahun 2032 diperkirakan jumlah populasi perempuan di Indonesia lebih banyak 21 ribu jiwa dibandingkan populasi kaum pria. Jika perempuan tidak diberdayakan maka akan ada ketimpangan produktivitas dan mampu berdampak pada peningkatan perekonomian juga pada nilai sosial.

Oleh karena itu untuk menjaga kualitas dan tujuan dari birokrasi maka, keadaan tersebut direspon dengan dicantumkan ke dalam UUD' 1945 yang melindungi prinsip persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dan demi menunjang keadilan sosial sebagaimana yang terdapat pada pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negeri bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. "selain itu keterlibatan setiap warga negara dalam pemerintahan dan politik dalam jenjang nasional maupun lokal sudah diatur ke dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya pada pasal 28 I ayat 2 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Dapat diartikan secara filosofis, Indonesia menjamin

dan melindungi setiap warga negaranya dari sikap atau tindakan diskriminatif termasuk dalam diskriminatif pada perbedaan gender dengan adanya peraturan perundang-undangan gender yang diadopsi ke dalam sebuah kebijakan UU Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 46 yang dimaksud dengan "keterwakilan wanita" adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Gambar 1. Jumlah PNS Berdasarkan Instansi dan Gender



Sumber: *Buku Statistik Badan Pegawai Negeri Sipil 2019*.

PNS pada 31 Desember 2019 berjumlah 4.189.121, perbandingan jumlah PNS pria dan wanita pada Desember 2019 adalah PNS pria sejumlah 2.031.294 orang atau 48,49% sedangkan jumlah PNS wanita adalah 2.157.827 orang atau 51,51% sehingga dapat disimpulkan bahwa selisih

jiwa. diakses Pada 20 Agustus 2020
pkl:20.31

² "Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta->

perbandingan jumlah PNS Wanita adalah 0,03% lebih banyak daripada jumlah PNS Pria. Data tersebut menunjukkan peningkatan pada kuantitas perempuan walau hegemoni nilai-nilai maskulinitas yang begitu melekat pada perempuan menyebabkan laki-laki dikondisikan atau identikan sebagai pemimpin sehingga membuat perempuan enggan untuk meningkatkan karirnya ke jenjang yang lebih tinggi, disamping itu saat ini kita dapat melihat kiprah kemajuan dari pemberdayaan perempuan dengan munculnya kepemimpinan perempuan yang semakin meningkat pada abad-21. Perempuan mulai bergerak dalam berbagai peran dan posisi strategis dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam kepemimpinan.

Di Indonesia pasca reformasi kepemimpinan perempuan pernah menjadi sejarah yakni Presiden pertama perempuan Mega Soekarnoputri yang dikenal sebagai tokoh ibu pemimpin partai besar PDIP, tidak hanya itu ada beberapa pemimpin perempuan yang turut duduk dalam kekuasaan kursi birokrasi dalam tingkatan yang berbeda salah satunya pemimpin Wali Kota Tangerang Selatan yang menjabat selama II periode kepemimpinan adalah Airin Rachmi Dianny, S.H., M.H., M.Kn.

Kepemimpinan perempuan merupakan polemik yang menarik untuk diteliti karena masih minimnya presentase kepemimpinan sehingga dianggap menjadi hal yang jarang ditampilkan publik, namun dibalik itu kepemimpinan perempuan menjadi cara pembelajarannya yang baru bagi para aktor kepemimpinan, perempuan yang memiliki sisi yang berbeda dan perannya yang dibangun dalam karakter kepemimpinannya menjadi hal

baru bagi publik sehingga fenomena ini menjadi sebuah wadah yang layak untuk diteliti sebagai informasi baru terkait kepemimpinan publik dan gaya baru dalam pemerintahan dimana sisi yang berberda tersebut menimbulkan dampak yang berbeda, karena peran ketegasan yang biasa di identikan dengan gaya maskulin kini diperankan oleh perempuan dengan cara dan karakter yang identik feminim.

Kehadiran Pemerintahan dan Pemerintah merupakan sebuah urgensi ditengah terciptanya sebuah masyarakat, Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk bekerjasama dan bersatu dalam suatu tatanan bermasyarakat yang dikelola biasa disebut dengan istilah “Negara” untuk mengatur suatu tatanan negara diperlukan suatu kuasa yang berwenang menjalankan aturan di masyarakat seperti yang dikemukakan:

“Untuk menjalankan sebuah negara agar dapat mencapai ketentraman, kesejahteraan, dan kesentosaan bersama diperlukan penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan suatu negara. Penguasa dalam terminologi ilmu negara, ilmu politik, ilmu administrasi biasanya dengan istilah pemerintah. Sedangkan kegiatan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara disebut dengan istilah pemerintahan.” (Salam 2007:34)

Sistem Pemerintahan di Indonesia ditinjau dari dimensi ekonomi yakni (untuk rakyat mendapatkan kesempatan dan kebebasan yang sama dalam pengembangan ekonomi), dimensi politik (masyarakat dapat berdaya

secara politik), dan dimensi psikologis (perasaan individu dapat terakumulasi menjadi perasaan kolektif (bersama) agar menghindarkan dari ketimpangan dan terciptanya demokrasi) berdasarkan tinjauan dari ketiga dimensi tersebut Indonesia memiliki sistem pemerintahan desentralisasi terpusat terdapat pembagian kekuasaan atau *Distribution of power* hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada pemerintahan pusat (sentralis) dan pemerintahan daerah (desentralisasi), selain itu berbagai aspek lain yang ditinjau mendukung penerapan kekuasaan pemerintahan daerah (desentralisasi) yakni Indonesia secara geografis terdiri dari berbagai pulau-pulau, secara historis Indonesia berdiri dari kerajaan- kerajaan dan memiliki nilai- nilai sosial dan budaya yang berbeda-beda disetiap daerah yang ada di Indonesia.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat C.F Strong Dalam Hukum Pemerintah Daerah oleh Fahmi Amrusi menyebutkan bahwa:

“Pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.” (C.F Strong, 2012:28)

Dari definisi ahli tersebut menegaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan sub - sistem dari pemerintahan pusat yang memiliki hak atas kekuasaan yang berdaulat

Pengertian Pemerintah Daerah dalam pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Konsep kepemimpinan merupakan komponen fundamental di dalam menganalisis proses dan dinamika di dalam organisasi maupun pemerintahan. Untuk itu pada penelitian ini kepemimpinan merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Kepemimpinan secara etimologi berasal dari kata “pimpin” yang berarti tuntun, bina atau bimbing dapat pula memiliki arti menunjukkan jalan yang baik atau benar, dan arti lain adalah mengepalai pekerjaan atau kegiatan nilai sebuah kepemimpinan dikemukakan Menurut Wahjosumidjo:

“Kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti: kepribadian (personality), kemampuan (ability) dan kesanggupan (capability). Kepemimpinan juga sebagai rangkaian kegiatan (activity) pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan (posisi) serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi.” (Wahjosumidjo, 1987:11)

Dirinci lebih dalam oleh Soekarso dan Iskandar Putong dalam bukunya *Kepemimpinan Kajian Teoritis dan*

Praktis bahwa dalam organisasi fungsi –fungsi kepemimpinan dalam organisasi antara lain “enam F” sebagai berikut:

1. Fungsi pengambilan keputusan (*Decision Making*).
 2. Fungsi Pengarahan (*Directing*).
 3. Fungsi Pendelegasian (*Delegation*).
 4. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*).
 5. Fungsi Fasilitasi (*Facilitating*).
 6. Fungsi Pengendalian (*Controlling*).
- (Soekarso,2015:18)

Selanjutnya gaya kepemimpinan maskulin dan feminin yang memiliki beberapa perbedaan ciri-ciri dari feminim dan maskulin Menurut Loden dalam Situmorang, sebagai berikut:

“Ciri-ciri dari gaya kepemimpinan maskulin adalah kompetitif, otoritas hirarki, kontrol tinggi bagi pemimpin, tidak emosional, dan analisis dalam mengatasi masalah. Sedangkan ciri-ciri gaya kepemimpinan feminim yaitu kooperatif, kolaborasi dengan manajer dan bawahan, kontrol rendah bagi pemimpin dan mengatasi masalah berdasar intuisi dan empati.” (Situmorang, 2011)

Kepemimpinan Walikota perempuan di Tangerang Selatan ini dianalisa berdasarkan dimensi-dimensi dari teori dan penelitian ini untuk mampu mendeskripsikan sebuah kepemimpinan perempuan dan menganalisa, Kepemimpinan Walikota Perempuan Di Kota Tangerang Selatan

serta dampak dari kepemimpinan Walikota Perempuan pada pemberdayaan perempuan atau pengarusutamaan gender pada II periode berlangsung yang disesuaikan dengan tahun penelitian ini yakni pada 2011-2019.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain secara holistik dalam bentuk deskripsi berupa kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Sugiyono (2014:224) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.” Pada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan document pendukung serta studi pustaka. Untuk tercapainya tujuan dari penelitian diperlukan adanya informasi dan data- data yang memadai untuk mendapatkannya peneliti memerlukan informan sebagai sumber informasi dalam penelitian, berdasarkan kriteria di atas yang relevan untuk penelitian ini:

1. Informan adalah pelaksana penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang mana terpengaruh oleh Kepemimpinan Perempuan Pada Wali Kota Tangerang Selatan, yakni Pejabat publik dan Aparatur sipil negara yang berada di pemerintahan kota

- Tangerang Selatan menjadi pelaksana pemerintahan kota yang berkaitan dengan kepemimpinan Airin Rachmi Diany, S.H.M..Kn
2. Informan adalah pelaksana pengawasan dari kegiatan pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang mana mengawasi kebijakan dan anggaran pada pemerintahan Kota Tangerang Selatan yakni lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 3. Informan menjadi sasaran dari terlaksananya tujuan kepemimpinan pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang mana memiliki pandangan dengan kepemimpinan perempuan pada Wali Kota Tangerang Selatan yang mana adalah masyarakat Kota Tangerang Selatan
 4. Informan merupakan bagian dari sasaran terlaksananya tujuan pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang mana memiliki peran yang penting dalam kemajuan Kota Tangerang Selatan adalah pemuda Kota Tangerang Selatan.

PEMBAHASAN

Kepribadian erat kaitan dengan segi-segi mental ideologis, sebab di dalamnya akan lebih banyak menyangkut norma-norma sistem nilai yang berlaku ditengah masyarakat dan menjadi pedoman ukuran pada setiap unsur kepemimpinan yang sejatinya

menjadi tauladan dan cerminan masyarakat seperti perilaku, kompetensi diri, kejujuran, penampilan dan sebagainya. Kepribadian merupakan hal penting bagi seorang pemimpin dalam membangun interaksinya dengan masyarakat sehingga keberadaanya sebagai seorang pemimpin mendapat penerimaan dimasyarakat. Airin Rachmi Diany dikenal sebagai sosok perempuan yang tangguh dikarenakan melihat latar belakangnya menghadapi permasalahan keluarga yang menerpa dirinya saat menjabat sebagai seorang kepala daerah

Dimana suaminya Tubagus Chaeri Wardana terjerat kasus korupsi di daerah yang dipimpin. Dilansir oleh CNN Indonesia (17/12) ³ Tubagus Chaeri Wardana bersama kakaknya, Ratu Atut Chosiyah, ia terbukti bersama-sama melakukan korupsi pengadaan alat kedokteran RS Rujukan Banten pada APBD TA 2012 dan APBD-Perubahan 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp79,789 miliar.

Selain itu, ia juga terbukti terlibat dalam proses pengadaan alat kesehatan kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBD TA 2012 sebesar Rp14,528 miliar. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menjadi tujuh tahun, terpidana kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp94,317 miliar. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan banding yang

³

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/vonis-tubagus-chaeri-wardana-diperberat-jadi-7->

[tahun](#) diakses Pada 19 Febuari 2021 Pkl. 20:27 WIB.

dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas vonis empat tahun yang diterima Wawan sebelumnya, akhir Juli lalu.

Selain menambah masa hukuman menjadi tujuh tahun, hakim juga mewajibkan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu mengembalikan uang sebesar Rp58 miliar. "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan." demikian bunyi amar putusan majelis hakim seperti dikutip dari situs resmi MA, Kamis (17/12).

Selain isu tersebut bayang-bayang dari latar belakangnya yang mengaitkan dirinya dengan dinasti politik di Banten menghadapi hal tersebut Airin mampu keluar dari permasalahan tersebut dan menghadapinya dengan bersikap profesional membedakan kapasitas dirinya saat menjadi seorang pemimpin daerahnya dan saat mejadi seorang ibu serta istri.

“seorang pemimpin yang kuat secara pola kepemimpinannya, cerdas mampu mengerti permasalahan, jiwa empatinya ada sehingga mampu membangun Tangerang Selatan seperti sekarang ini, baik dan sanggup memimpin ditengah gelombang kasus keluarganya mampu bersikap profesional dan menangkapnya.”⁴ Selanjutnya

pendapat yang serupa “santun, cerdas dan kuat dalam segala hal.”⁵

Pribadi lain yang melekat pada kepemimpinan Airin Rachmi Dianny adalah karakter kepemimpinan yang sensitif, kepemimpinan ini ditandai dengan adanya kemampuan untuk secara dini memahami dinamika perkembangan masyarakat, mengenai apa yang mereka butuhkan mendengarkan dan memberi perhatian terhadap kebutuhan tersebut.

“ada *open house* secara berkala dengan masyarakat setiap jumat untuk mendengarkan keluhan dan rapat berkala dengan dinas-dinas”⁶

Lain hal yang menunjang pribadi Airin Rachmi Dianny adalah penampilan yang anggun dan penampilan yang cantik menjadi daya tarik bagi sebagian besar masyarakat menilai Airin Rachmi Dianny dibalik itu beliau merupakan memiliki pengalaman di *Beauty Pageants* salah satunya finalis Puteri Indonesia (1996) seperti yang telah dipaparkan sebelumnya sehingga kecantikan paras serta tata perilaku yang dimiliki mendukung modal sosialnya.

Kepribadian kepemimpinan perempuan Walikota Kota Tangerang Selatan pada 2011-2019 menunjukkan pribadi yang tangguh, keibuan, karakter kepemimpinan yang sensitif dan hal lain menunjang pribadinya adalah wawasannya luas dan penampilan yang anggun selain itu dipaparkan sebelumnya pengalaman

⁴ Wawancara DPRD Tangerang Selatan

⁵ Wawancara Ketua Samiun Ketua RW

⁶ Wawancara Feb Amni yati mantan sekretaris Dinas PT2PA

sosial dan karirnya menunjang modal sosialnya sebagai seorang pemimpin kepada daerah.

Pada kepemimpinan kekuasaan yang dimilikinya dapat disalurkan dalam berbagai hal termasuk pada pengkoordinasian dalam menunjukan kedudukan dari kepemimpinannya yakni memberikan arahan untuk mengerakan organisasi. Pengkoordinasian kepemimpinan yang telah terlaksana terlihat cukup mumpuni dan sampai koordinasinya pada sebagian masyarakat dan sebagainya merasa belum puas dan optimal pengkoordinasian yang selama ini terlaksanan hal ini dapat dijadikan perbaikan dalam sisi pengkoordinasiannya untuk ditinjau ulang kepada sebagian masyarakat yang masih merasa belum sampai pengkoordinasiannya menjadi catatan perbaikan agar kepemimpinan yang berlangsung bisa berjalan secara optimal karna pengkoordinasian merupakan elemen penting dalam meninjau keberhasilan kepemimpinan bentuk kooordinasi kepemimpinan akan mengarahkan bagaimana kepemimpinan tersebut dijalankan.

Kegiatan kepemimpinan atau program kerja merupakan bentuk dari buah kepemimpinan dari data pendukung lainnya menunjukan program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan dikepemimpinan perempuan ini menuai pendapat yang positif dalam beberapa kegiatan diantaranya pada program kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan Pendidikan dan akses kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat namun pada sisi sosial lainnya masih ada yang belum dioptimalkan adanya pelaksanaan program kerja ini yang baiknya apabila dilakukan perbaikan

hal tersebut mendukung kepemimpinan perempuan Walikota Tangsel ini kesanggupan dari kepemimpinan perempuan Walikota Tangerang Selatan yang berlangsung dinilai sanggup karna telah berlasung kedalam dua periode dan menuju akhir kepemimpinannya yang menyimpulkan bahwa tanggungjawab kepemimpinannya mampu terlaksana namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki karna Sebagian pihak masih merasa adanya pengaruh dari kepemimpinan secara optimal.

Terlihat pada kepemimpinan perempuan Walikota Tangerang Selatan ini baik didalam data pendukung pada pemaparan profile dan capaian yang telah terlaksana serta pendapat dari berbagai informan yang terlibat memaparkan dikempeimpinannya Airin Rachmi Dianny menjolkan karater yang disiplin, berwiba dan kharimatik disisilain untuk mencapai kepemimpinannya ia menjaga hubungan baik dengan *Stakeholder* yang berperan dalam kepemimpinannya seperti ibu-ibu beliau melakukan pendekatan yang menarik simpatik dan menjaga loyalitas pendukungnya dengan bersikap aktif dan komunikatif pada pendukungnya.

Tabel 1. Pemaparan Analisis SWOT

<i>Strength</i> (Kekuatan)	<i>Weakness</i> (Kelemahan)
<ul style="list-style-type: none">- Kecerdasan intelektual sehingga sebagai seorang pemimpin memiliki wawasan yang luas- Penampilan anggun dan wajah cantik hal	<ul style="list-style-type: none">- Kurang responsif- Koordinasi tidak mencapai kesemua lini sehingga berdampak pada hal tertentu- Belum berani

<ul style="list-style-type: none"> - tersebut membuat sosoknya menarik dimasyarakat - Perilaku keibuan - Karakter yang sensitif - Tangguh - Kecakapan sosial yang baik - <i>Public Speaking</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - membuat perubahan besar - Masih kurang inisiatif - Pembangunan tidak merata
<i>Opportunity (Peluang)</i>	<i>Threat (Ancaman)</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Daerah yang potensial untuk dikembangkan - Pendapatan Daerah yang tinggi - Memiliki pendukung - Perkembangan digital dalam komunikasi - Kefektifan dan efisiensi kinerja menggunakan e-governance 	<ul style="list-style-type: none"> - Bayangan dinasti politik banten - Keluarga yang terjerat kasus korupsi - Sumber daya manusia yang belum maksimal - Permasalahan sosial masyarakat - Kesenjangan sosial

Sumber: Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan pemaparan hasil SWOT diatas, peneliti dapat Menyusun alternatif strategi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada:

1. Pada kolom Strategi S-O (*Strength-Opportunity*), menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

2. Pada kolom Strategi ST (*Strength-Threat*), menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
3. Pada kolom Strategi WO (*Weakness-Opportunity*), menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
4. Pada kolom Strategi WT (*Weakness-Threat*), menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Tabel 2. Strategi Untuk Kepemimpinan Walikota Perempuan Kota Tangerang Selatan

EFI EFE	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Meningkatkan kebudayaan dan penguatan ikon Kota Tangerang Selatan melalui program kerja dan <i>Campaign</i> digital	Memperhatikan prioritas pembangunan kerja kepada wilayah lebih membutuhkan agar pembangunan maksimal dan tepat sasaran wadah aspirasi masyarakat setembuka secara berkala
Ancaman (<i>Threat</i>)	Membangun komitmen untuk memaksimalkan penggunaan E-Government agar	Membangun <i>self-branding</i> kepada publik melalui media dengan melakukan

transparasi dan keterbukaan publik selain itu membuka program kegiatan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berkala sehingga masyarakat ikut aktif dalam proses kepemimpinan	<i>campaign</i> dan program kerjanya selain itu mereviu ulang serta membuat target pencapaian pada kebijakan yang ditetapkan
--	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat merekomendasikan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan Walikota Perempuan 2011-2019 salah satu pertimbangan terkait pemecahan masalah yang terdapat dalam kepemimpinan yang telah terlaksana sebelumnya agar mampu memaksimalkan capaian keberhasilan kepemimpinan untuk kedepannya nanti, diantaranya sebagai berikut:

- Meningkatkan kebudayaan dan penguatan ikon Kota Tangerang Selatan melalui program kerja dan *Campaign* digital, hal ini dilakukan karna melihat dari keadaan dan beberapa pendapat informan mengatakan bahwa ikon dan kebudayaan Tangerang Selatan masih menjadi nilai yang kurang pada kepemimpinan Airin Rachmi Dianny hal ini dilakukan untuk membangun *branding* Kota Tangerang Selatan dan meningkatkan

- sector pariwisata, investasi dan perekonomian
- Memperhatikan prioritas pembangunan kerja kepada wilayah lebih membutuhkan agar pembangunan maksimal dan tepat sasaran wadah aspirasi masyarakat setembuka secara berkala, untuk mengatasi kesenjangan sosial dimasyarakat karena perbedaan sarana dan prasaran serta akses hal ini perlu disoroti agar tidak menjadi hambatan kedepannya dan semua kalangan dapat merasakan kehadiran dan dampak dari kepemimpinannya
- Membangun komitmen untuk memaksimalkan penggunaan E-Government agar transparasi dan keterbukaan publik selain itu membuka program kegiatan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berkala sehingga masyarakat ikut aktif dalam proses kepemimpinan, di era-digital ini perubahan demi perubahan terjadi untuk itu pemerintahan perlu untuk beradaptasi dengan tuntutan kinerja efektif untuk menunjang akses pelayanan yang cepat maka e-government menjadi solusi dalam kepemimpinannya memang sebagai penerapan *E-Government* ini dirasakan cukup efektif namun belum sepenuhnya dan melalui ini keterbukaan pemerintahan kepada publik dapat disampaikan dengan lebih efisien sehingga kepercayaan publik terhadap kualitas kepemimpinan dapat

meningkat selain itu kegiatan yang melibatkan masyarakat meningkatkan partisipatif dan kesadaran masyarakat serta peranannya untuk ikut berdaya dan berkembang dengan Kota Tangerang Selatan peranan pemuda juga dapat ditingkatkan dari nilai itu membuat kepuasan masyarakat meningkat.

- Membangun *self-branding* kepada publik melalui media dengan melakukan *campaign* dan program kerjanya selain itu mereview ulang serta membuat target pencapaian pada kebijakan yang ditetapkan, kita ketahui dari paparan sebelumnya Airin Rachmi Dianny dikepemimpinnya tidak terlepas dari bayangan politik dinasti untuk itu menjadi hal yang penting baginya melakukan *Self-branding* untuk memperbaiki citra agar publik tidak menilai kinerjanya hanya dari satu sisi dan simpati masyarakat mampu untuk ditingkatkan melalui cara ini dan agar tidak hanya menjadi omong kosong hal ini dapat diimplementasikan dalam program kerjanya dan kebijakan yang diputuskan agar hasilnya dapat dinilai oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Kepemimpinan merupakan komponen fundamental di dalam dinamika pemerintahan maupun capaian dari tujuan bersama. Posisi kepemimpinan biasa didominasi oleh kaum laki-laki masih sedikit sekali presentase perempuan yang berkiprah

dalam kepemimpinan maupun diposisi kedudukan yang tinggi hal ini berdasarkan kepribadian, kedudukan, kegiatan, kesanggupan dan kemampuannya sebagai seorang pemimpin serta menganalisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Kepribadian dari kepemimpinan Walikota perempuan Kota Tangerang Selatan 2011-2019 adalah keibuan, tangguh, berwawasan luas, anggun, paras cantik, dan sederhana
- Kedudukan dari kepemimpinan Walikota perempuan Kota Tangerang Selatan 2011-2019 dari pengkoordinasian kepemimpinannya cukup baik ke masyarakat, namun pada internal pemerintahan masih perlu diperbaiki kembali. Kegiatan dari kepemimpinan Walikota Perempuan Kota Tangerang Selatan 2011-2019 adalah program kegiatan Airin Rachmi Dianny yang cukup unggul dibidang kesehatan dengan akses yang muda, pembangunan fasilitas pendidikan dan pencatatan sipil menunjukkan perubahan baik tetapi pada lingkungan seperti pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan program kerja yang belum maksimal atau sesuai target perlu dilakukan review dan aspirasi masyarakat secara berkala.
- Kesanggupan dari kepemimpinan Walikota perempuan Kota Tangerang

Selatan 2011-2019 cukup sanggup karna kepemimpinanya sudah berlangsung selama dua periode meskipun pada periode awal belum banyak perubahan dan masih meninjau keadaan baru di periode kedua kepemimpinan Airin Rachmi mulai terlihat.

- Kemampuan dari kepemimpinan Walikota perempuan Kota Tangerang Selatan 2011-2019 sesuatu yang menonjol pada kepemimpinannya adalah adanya capaian kinerja yang terlaksana, dibebberapa bidang cukup unggul mampu memotivasi oranglain, menjaga stabilitas *stakeholder* kepemimpinannya.

Berdasarkan analisa SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) kepemimpinan Walikota perempuan Kota Tangerang Selatan secara internal memiliki modal sosial yang mumpuni untuk mengembagkan diriny sebagai seorang pemimpin, namun dilatarbelakangnya menjadi seorang pemimpin tidak terlepas dari bayangan politik dinasti yang membebani namun dengan kemampuan diri dan kondisi daerah yang mendukung kepemimpinanya proses kepemimpinan dapat terlaksana dengan baik diluar hal tersebut beberapakeadaan eksternal berpeluang menjadi hambatan kemimpinanya seperti kesenjangan sosial dimasyarakat karna kondisi pembangunan infrastruktur belum merata dan kualitas sumber daya manusia yang masil belum berdaya

maksimal untuk mengembangkan potensi daerah.

Dampak dari kepemimpinannya bagi sebagian masyarakat merasakan perubahan dan perbaikan namun ada sebagaian yang masih belum cukup tersentuh bidangnya untuk dioptimalkan perubahan yang diterima pada kepemipina perempuan Walikota Tangerang selatan rata-rata memberikan pendapat cukup puas atas apa yang diperoleh dari kepemimpinannya namun sebagainnya maih ada yang merasa nihil dikarenakan APBD Kota Tangerang Selatan yang besar daya serap yang diberikan kepada masyarakat dan dampak perubahan bagi Kota Tangerang Selatan seharusnya jauh lebih baik dari pada ini dengan begitu sebagian masyarakat yang merasa belum cukup puas berharap ada optimalisasi dari kepemimpinan ini dan perubahan yang jauh lebih signifikan.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah disajikan diatas, sejumlah saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan Walikota Tangerang Selatan kedepannya sebagai berikut:

- (a) kepemimpinan perempuan Walikota Tangerang Selatan harus lebih merangkul kesegela lini dan aspek agar tidak ada ketimpangan serta mampu mnegoptimalkan kinerja kepemimpinanya dan semua pihak merasakan dampak dari kepemipinanya
- (b) Pada kepemimpinanya sebaiknya melakukan review ataupun pengecekan

pada implementasi kebijakan atau program kegiatannya untuk memastikan koordinasi yang berlangsung dibawahnya tepat pada target dan pencapaian keberhasilan terukur lebih pasti

(c) Alangkah baiknya jika kepemimpinannya memberikan wadah keterbukaan aspirasi masyarakat dengan jalur yang mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat dan memperhatikan pembangunan sumber daya manusia di Kota Tangerang Selatan untuk mendukung keberhasilan dari kepemimpinannya.

(d) Lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk sampai pada tahap implementasi dan memperhatikan penegakan dari kebijakan yang berlangsung ditengah masyarakat

(e) Memberikan perhatian kepada permasalahan sampah yang menjadi polemic dimasyarakat serta lingkungan selain itu membuka ruang terbuka hijau lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat mampu mengelolanya

(f) memperhatikan wilayah yang tidak dikelola oleh pengembang seperti pasar yang dikelola pemerintah masih belum layak fasilitasnya dan pembangunan yang dikelola pemerintah sendiri masih belum optimal sehingga nantinya berdampak pada kesenjangan sosial ditengah masyarakat apabila hal ini tidak diperbaiki.

REFERENSI

A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2005. *Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Ahmad Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras

Aida Vitayala S. Hubeis, 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. IPB Press, Bogor

Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Bass, B. 1990. *Bass and Rf leadership: Theory, research, and managerial application. Third Edition*. New York: New York: Free Press.

Danang Sunyoto. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: CAPS

Dimock & Dimock. 1993. *Administrasi Negara*. Jakarta: Erlangga

Doyle, James A, 1985. *Sex and Gender: The Human Experience Wn. C. Brown Publisher, Iowa*.

Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda. (2012). *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung.

Fitriani, A. 2015. Gaya kepemimpinan perempuan. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(2), 1-22.

Gibson.L.J. dkk. 1998. *Organisasi (terjemahan)*, Jakarta Erlangga

Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara.

HR. Ridwan, (2013). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Keban, Yeremias T. 2008. *Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gaya Media

Labolo, M. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.S. Pamudji.

1983. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mangkoesebroto, Guritno, 1993. *Ekonomi Publik, Edisi-III*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Moedjiono, I. 2002. *Kepemimpinan dan Keorganisasian*. Yogyakarta: UII Press.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ryas Rasyid. 2009. *Makna Pemerintahan ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Salam, D. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Salusu, J. 2006. *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Silalahi, Ulbert. 1992. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: CV Sinar Baru
- Simon, H. A. 1985. *Administrative Behaviour*. New York: Macc Millan.
- Situmorang, N.Z. 2011. *Gaya kepemimpinan perempuan*. Proceeding PESAT Vol. 4.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekarso dan Putong, Iskandar. 2015. *Kepemimpinan: Kajian Teoritis dan Praktis*. Bogor: Mitra Wacana Media. Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Thoha, Miftah. (1995). *Dimensi prima Administrasi Negara*. FISIP, Yogyakarta
- Tuti, R. W. 2020. *Kepemimpinan Walikota Surabaya Tri Rismaharini Sebagai Model Birokrasi Efektif*. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 4(1), 73-82.
- Usman Effendi. 2011. *Asas Manajemen, Jakarta*; PT Raja Grafindo
- Wahjosumidjo. 1987. *Kepemi dan mpinan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wicaksono, A. B. 2013. *Pengaruh Efektivitas Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Winardi. (1989). *Strategi pemasaran*. Bandung: Mandar maju
- Peraturan Perundang-undangan**
Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum
Undang- Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ayat (1) huruf f Pasal 65
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender

Arsip Pemerintah

Rancangan Pembangunan Daerah
(RPJMD) Kota Tangerang
Selatan 2011-2015

Rancangan Pembangunan Daerah
(RPJMD) Kota Tangerang
Selatan 2016-2021

Laporan Hasil Kinerja Pemerintah
Kota Tangerang Selatan
Tahun 2019